

Bina 71 Desa di Kepulauan Riau, IMIGRASI TEKAN POTENSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Rendahnya literasi keimigrasian dan tingginya kebutuhan mendapat pekerjaan melatarbelakangi hadirnya kasus demi kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia. Tak hanya untuk menekan potensi tindak pidana perdagangan orang, program Desa Binaan Imigrasi menjadi salah satu upaya Ditjen Imigrasi dalam memperluas wawasan keimigrasian masyarakat yang lebih berdampak.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperluas program Desa Binaan Imigrasi guna menekan potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya melalui jalur penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Kali ini, sebanyak 71 desa/kelurahan di Kepulauan Riau menjadi target program kolaboratif antara kantor imigrasi dan perangkat desa setempat ini.

"Tujuan dari program Desa Binaan Imigrasi, yaitu memperluas jangkauan akses informasi keimigrasian, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan jangkauan ke kantor imigrasi dan desa-desa yang menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia," Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan

HAM (Kemenkumham) Kepulauan Riau I Nyoman Gede Surya Mataram menuturkan saat acara peresmian Desa Binaan Imigrasi di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (14/5).

Selain memberikan kemudahan akses informasi terkait permohonan paspor Republik Indonesia, program tersebut juga memberi manfaat signifikan bagi siswa sekolah menengah (kelas IX–XII) dan mahasiswa semester akhir yang berisiko menjadi sasaran eksploitasi pihak-pihak tak bertanggung jawab. Edukasi yang diberikan dalam program ini juga diharapkan dapat meminimalisasi perlintasan tanpa dokumen keimigrasian resmi di wilayah perbatasan Indonesia.

"Imigrasi didukung oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri dan

Pemda Kepri aktif mengupayakan perlindungan dari berbagai modus penipuan yang akan terus dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Program desa binaan ini juga terus digencarkan di berbagai daerah agar warga negara Indonesia yang perlu bekerja atau belajar di luar negeri senantiasa aman," ujar Surya.

Program Desa Binaan Imigrasi pertama kali dicanangkan di Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Rendahnya literasi keimigrasian dan tingginya kebutuhan akan mata pencaharian melatarbelakangi hadirnya kasus demi kasus yang menimpa PMI.

Untuk mencegah TPPO secara sistematis dan luas, Desa Binaan Imigrasi kemudian menjadi salah satu program skala nasional Ditjen Imigrasi bersama pemerintah daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah di Indonesia. Melalui program ini, diharapkan wawasan masyarakat desa lebih terbuka. Mereka pun bisa menjadi PMI yang memiliki posisi tawar, berani memperjuangkan haknya, serta bisa menjaga dirinya sendiri dari percobaan eksploitasi. ■

Kakanwil Kemenkumham Kepulauan Riau (Kepri) I Nyoman Gede Surya Mataram mengalungkan medali kepada pejabat pembina desa imigrasi di Aula Wan Seri Beni, Dompok, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Foto: Dok. Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau)

